



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (GHAIB), disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/II/2013, tertanggal 04 Januari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 04 Tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013;
- XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017;
- XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022;

3. Bahwa sejak 05 bulan setelah menikah, yakni di Bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya, terhitung sejak pisah rumah;
- Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat ketahuan memiliki hutang dengan oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak peduli dengan Penggugat dan ketiga anaknya yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak di ketahui keberadaannya, Sedangkan Penggugat saat ini masih tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (GHAIB) sesuai dengan surat keterangan Nomor; 474.4/4/TN/I/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tumpatan Nibung tertanggal 16 Januari 2024;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013;
  - XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017;
  - XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Nomor XXX, tertanggal 04 Januari 2013, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-17012014-0252 tanggal 10 Februari 2014, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03012018-0005 tanggal 03 Januari 2018, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Simalungun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-02122022-0151 tanggal 03 Januari 2018, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. XXX, Umur 35 tahun, Pekerjaan bengkel las, Agama Islam, Alamat di XXX Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
  - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya, terhitung sejak pisah rumah;
  - Tergugat memiliki sifat tempramental;
  - Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat ketahuan memiliki hutang dengan oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pengugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
  - Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
  - Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;
2. XXX, Umur 60 tahun, Pekerjaan bengkel las, Agama Islam, Alamat di XXX Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
  - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya, terhitung sejak pisah rumah;
  - Tergugat memiliki sifat tempramental;
  - Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat ketahuan memiliki hutang dengan oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak seusianya;
- Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh Saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, serta saksi-saksi yaitu Rohadi bin Saiman dan Mar Supriadi bin Misjak;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juni 2013;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita idaman selain Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya, terhitung sejak pisah rumah; Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat suka bermain judi online, sehingga Tergugat ketahuan memiliki hutang dengan oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 10 maret 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

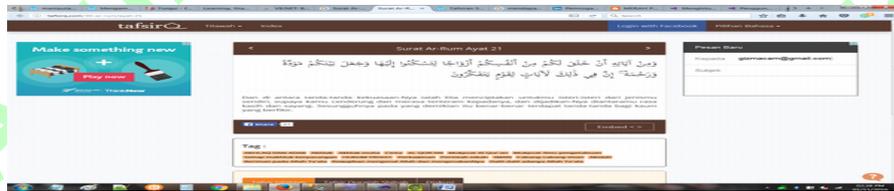
Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022 yang pada saat ini tinggal bersama Penggugat ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa akta kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah bekerja dan mengurus rumah tangga, Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022 ;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak di bawah pemeliharaan Penggugat selama ini dalam keadaan baik, aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, disamping pekerjaan Penggugat lainnya sehingga mempunyai cukup waktu untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ibu demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak berpijak pada "Demi kepentingan terbaik bagi anak, mana yang paling maslahat bagi anak, dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, harus dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2013, XXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2017 dan XXX, perempuan, lahir pada tanggal 14-06-2022, dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp**610.0000,00** ( enam ratus sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1445, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

|    |           |    |         |
|----|-----------|----|---------|
| 1. | PNBP      | Rp | 70.000  |
| 2. | Proses    | Rp | 50.000  |
| 3. | Panggilan | Rp | 370.000 |
| 4. | Meterai   | Rp | 10.000  |
| 5. | PBT       | Rp | 110.000 |

---

**Jumlah** Rp 610.000

**(enam ratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)